

## **PENGARUH PEMAHAMAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN AKTIVITAS PENGENDALIAN TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR**

**Sang Ayu Putu Arie Indraswarawati <sup>1)</sup>**

**Cokorda Gde Bayu Putra <sup>2)</sup>**

**I Putu Teresna Jaya Manggala <sup>3)</sup>**

*1) 2)3) Universitas Hindu Indonesia, surel: arie.indraswarawati@gmail.com*

### **ABSTRACT**

Research conducted aims to get a clear of financial accountability seen from the understanding of the financial accounting system in the Gianyar Regency Government, getting an idea of financial accountability seen from the activity control, try to give suggestions that can help the Gianyar Regency Government in solving the problems faced, especially the problems studied, namely the influence of understanding the regional financial accounting system and control activities on financial accountability in Gianyar Regency Government. The result of overall Iregression analysis indicate that 66,2% of the independent variables can be explained by the depemdent variable, while the remaining 33,8% is explained by other factors or variable,

**Keywords : Regional financial accounting standards, control activities, financial accountability**

### **PENDAHULUAN**

Dalam perkembangan era globalisasi saat ini, khususnya di negara maju, akuntansi pemerintahan dianggap sebagai bagian integral dan aspek keberhasilan reformasi sektor publik. Selain menjadi alat untuk modernisasi manajemen keuangan pemerintah, akuntansi dianggap sebagai senjata terhadap penipuan dan limbah di pemerintah (*Torres,2004:32*). Dalam konteks sektor publik, akuntansi harus dianggap sebagai informasi manajemen keuangan dan sistem pelaporan untuk penggunaan pemerintah dan manajemen, parlemen dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama (*Barton,2007:50*)

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 menyatakan bahwa “Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan sistem dan prosedur

pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk peraturan daerah”. Pembaharuan sistem keuangan daerah tersebut dimaksudkan agar pengelolaan uang rakyat (*public money*) dilakukan secara transparan dengan mendasarkan konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*). Tuntutan dilaksanakannya akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah sangat beralasan karena akuntansi dapat menjadi salah satu alat kontrol yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pemberdayaan masyarakat. Akuntansi keuangan daerah merupakan suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas Pemerintah Daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak – pihak eksternal entitas Pemerintahan Daerah.

Dalam konteks otonomi daerah, *value for money* merupakan jembatan untuk menghantarkan pemerintah daerah mencapai *good governance*. *Value for money* harus dioperasikan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Untuk mendukung dilakukannya pengelolaan dana publik (*public money*) yang mendasarkan konsep *value for money*, maka diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah yang baik. Hal tersebut dapat dicapai apabila pemerintah daerah memiliki sistem akuntansi keuangan daerah yang baik. Pengelolaan keuangan daerah juga harus dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga kesempatan untuk korupsi dapat diminimalkan. Sedangkan transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta

pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Selama ini pemahaman mengenai sistem akuntansi keuangan daerah, standar akuntansi pemerintahan, dan siklus akuntansi keuangan daerah menjadi sesuatu kurang dipahami oleh para pejabat pelaksana dan staf keuangan OPD. Berdasarkan latar belakang dan masalah diatas maka peneliti berniat untuk meneliti tentang seberapa besar “Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Gianyar. (Studi Kasus Pada OPD Kabupaten Gianyar). Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : (1) Apakah pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan OPD di Pemerintah Kabupaten Gianyar, (2) Apakah aktivitas pengendalian berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan OPD di Pemerintah Kabupaten Gianyar.

Tujuan penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui pengaruh pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) terhadap akuntabilitas keuangan OPD di Pemerintah Kabupaten Gianyar, (2) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh aktivitas pengendalian terhadap akuntabilitas keuangan OPD di Pemerintah Kabupaten Gianyar.

Penelitian ini dibangun menggunakan *grand theory* yaitu *agency theory*. Teori keagenan merupakan sebuah teori yang membahas mengenai hubungan antara atasan (prinsipal) dan bawahan (agen). Hubungan keagenan didefinisikan sebagai suatu kontrak yang terjadi pada saat prinsipal mulai memperkerjakan agen dan kemudian prinsipal mendelegasikan wewenangnya untuk mengambil keputusan kepada agen (Jensen dan Meckling, 1979). Teori keagenan membahas bahwa suatu pihak tertentu (prinsipal) akan

melimpahkan pekerjaan kepada pihak lain (agen) sehingga inti dari hubungan tersebut merupakan pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian.

Keuangan Daerah dapat diartikan sebagai “semua hak dan kewajiban yang dapat diniai dengan uang, demikian pula segala sesuatu berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku” (Mamesah,1995:16). Sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan APBD (Erlina dan Rasdianto, 2013:6).

Desentralisasi pemerintah daerah memiliki kesempatan yang luas untuk beradaptasi dalam perubahan lingkungan, adaptasi lingkungan berperan dalam keputusan pembuatan dan pelaksanaan Sistem Informasi Keuangan Daerah. Akuntansi Keuangan Daerah adalah menyediakan informasi keuangan yang lengkap, cermat dan akurat sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang andal, dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan masa lalu dalam rangka pengambilan keputusan seta perencanaan untuk masa yang akan datang.

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada unit organisasi pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui laporan keuangan pemerintah secara priodik. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang undangan.

**H1 : Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap kualitas Akuntabilitas Keuangan OPD.**

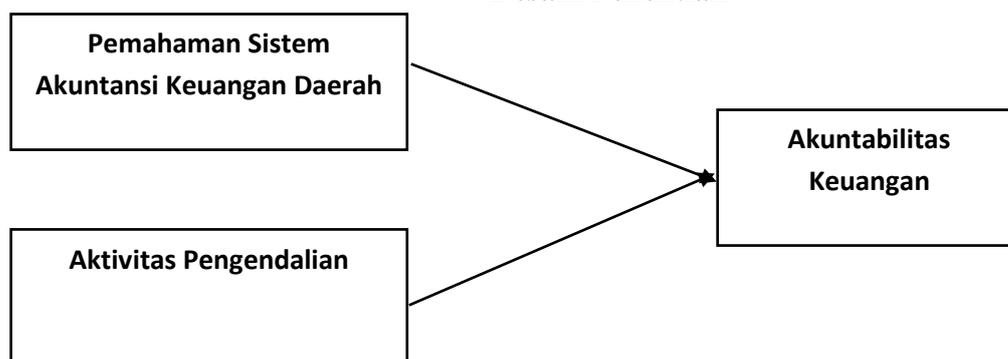
## **H2: Aktivitas Pengendalian berpengaruh terhadap kualitas Akuntabilitas Keuangan Daerah.**

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian model kausal (*causal model*) yaitu untuk melihat hubungan beberapa variabel yang belum pasti. Umar (2008:54) menyebutkan desain kausal berguna untuk mengalisis bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lain, dan juga berguna pada penelitian yang bersifat eksperimen dimana variabel independennya diperlukan secara terkendali oleh peneliti untuk melihat dampaknya pada variabel dependen secara langsung.

Peneliti menggunakan desain ini untuk memberikan bukti Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah pada OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar.

**Gambar 1**  
**Desain Penelitian**



Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Gianyar, dengan objek penelitian yaitu seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar .

Populasi dalam penelitian ini adalah OPD di Pemerintahan Kabupaten Gianyar, sebanyak 38 OPD. Teknik sampling dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel dalam penelitian ini adalah pelaksana utama penatausahaan keuangan OPD dalam hal ini adalah kasubag keuangan-perencanaan dan bendahara pengeluaran mengingat bahwa OPD di Kabupaten Gianyar sesuai Peraturan Daerah Nomor Tahun 5 tahun 2016 berjumlah 38 OPD maka sampel pada penelitian ini sebanyak **76 responden**. Sampel yang diambil yaitu dengan kriteria sebanyak 2 orang pejabat pada masing-masing OPD yaitu Bendahara dan Kasubag Keuangan-Perencanaan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik penyebaran kuisioner.

Data yang telah diperoleh kemudian diolah untuk dianalisis dan diinterpretasikan. Pengolahan data menggunakan SPSS 21 *For Windows*. Metode analisis data yang digunakan untuk mengolah data penelitian adalah regresi linier berganda Persamaan regresinya adalah :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2$$

**Keterangan:**

- Y** = Akuntabilitas Keuangan SKPD
- $\beta_0$**  = Intersep
- $\beta_1, \beta_2$**  = Koefisien regresi
- X1** = Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
- X2** = Aktivitas Pengendalian

**HASIL PENELITIAN**

Statistik deskriptif memberikan gambaran umum tentang objek penelitian yang dijadikan sampel penelitian. Penjelasan data melalui statistik deskriptif diharapkan memberikan gambaran awal tentang masalah yang teliti. Statistik deskriptif pada model dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1**  
**Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1)	76	15.00	24.00	19.5921	2.13027
Aktivitas Pengendalian (X2)	76	14.00	24.00	17.8158	2.53882
Akuntabilitas Keuangan (Y)	76	15.00	23.00	18.8026	2.02003
Valid N (listwise)	76				

Sumber : Data Diolah

Uji validitas instrument digunakan untuk mengukur sah atau *valid* tidaknya suatu kuesioner. Uji validitas dilakukan kepada 76 orang responden dengan cara mengkorelasikan antara skor item instrumen dengan skor total seluruh item pertanyaan.

**Tabel 2**  
**Uji Validitas Variabel Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

Pertanyaan	Pearson Correlation	Keputusan
<b>Pernyataan 1.</b>	0,676	Valid
<b>Pernyataan 2.</b>	0,676	Valid
<b>Pernyataan 3.</b>	0,761	Valid
<b>Pernyataan 4.</b>	0,754	Valid
<b>Pernyataan 5.</b>	0,557	Valid

Sumber: Data diolah

Hasil perhitungan nilai pearson correlation dari tiap-tiap butir pernyataan dalam kuisisioner yang diperoleh dengan bantuan *SPSS 21 for Windows* menunjukkan bahwa perhitungan nilai *pearson correlation* dari tiap-tiap butir pernyataan besarnya di atas 0,3. Hal ini berarti semua butir pernyataan dalam kuisisioner tersebut dapat dikatakan valid.

**Tabel 3**  
**Uji Validitas Variabel Aktivitas Pengendalian**

Pertanyaan	Pearson Correlation	Keputusan
<b>Pernyataan 1.</b>	0,672	Valid
<b>Pernyataan 2.</b>	0,699	Valid
<b>Pernyataan 3.</b>	0,706	Valid
<b>Pernyataan 4.</b>	0,683	Valid
<b>Pernyataan 5.</b>	0,763	Valid

Sumber: Data Diolah

Hasil perhitungan nilai *pearson correlation* dari tiap-tiap butir pernyataan dalam kuisisioner yang diperoleh dengan bantuan *SPSS 21 for Windows* menunjukkan bahwa perhitungan nilai *pearson correlation* dari tiap-tiap butir pertanyaan besarnya di atas 0,3. Hal ini berarti semua butir pernyataan dalam kuisisioner tersebut dapat dikatakan valid.

**Tabel 4**  
**Uji Validitas Variabel Akuntabilitas Keuangan**

Pertanyaan	Pearson Correlation	Keputusan
<b>Pernyataan 1.</b>	0,675	Valid
<b>Pernyataan 2.</b>	0,575	Valid
<b>Pernyataan 3.</b>	0,566	Valid
<b>Pernyataan 4.</b>	0,549	Valid
<b>Pernyataan 5.</b>	0,564	Valid

*Sumber: Data Diolah*

Hasil perhitungan nilai *pearson correlation* dari tiap-tiap butir pernyataan dalam kuisisioner yang diperoleh dengan bantuan *SPSS 21 for Windows* menunjukkan bahwa perhitungan nilai *pearson correlation* dari tiap-tiap butir pertanyaan besarnya di atas 0,3. Hal ini berarti semua butir pernyataan dalam kuisisioner tersebut dapat dikatakan valid.

Uji reliabilitas hanya dapat dilakukan setelah suatu instrument telah dipastikan validitasnya.

**Tabel 5**  
**Uji Reliabilitas Variabel Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.717	.718	5

*Sumber : Data Diolah*

Uji reliabilitas dilakukan kepada 76 orang responden dengan menghitung cronbach alpha dari masing-masing item dalam suatu variabel. Instrumen yang dipakai dalam

variabel dikatakan handal atau reliabel apabila memiliki cronbach alpha lebih dari 0,60 (Nunnaly, 1994 dalam Ghozali, 2006).

**Tabel 6**  
**Uji Reliabilitas Variabel Aktivitas Pengendalian**

Reliability Statistics			
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on	N of Items	
Standardized Items			
	.728	.752	5

*Sumbe*  
*r : Data Diolah*

Uji reliabilitas dilakukan kepada 76 orang responden dengan menghitung *cronbach alpha* dari masing-masing item dalam suatu variabel. Nilai *cronbach alpha* instrument variabel aktivitas pengendalian adalah 0.728. Dari angka *cronbach alpha* tersebut dapat dilihat bahwa variabel ini (Aktivitas Pengendalian) memiliki nilai *cronbach alpha* diatas 0.60 sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel.

**Tabel 7**  
**Uji Reliabilitas Variabel Akuntabilitas Keuangan**

Reliability Statistics			
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on	N of Items	
Standardized Items			
	.690	.704	5

*Sumber : Data Diolah*

Uji reliabilitas dilakukan kepada 76 orang responden dengan menghitung *cronbach alpha* dari masing-masing item dalam suatu variabel. Instrumen yang dipakai dalam variabel dikatakan handal atau reliabel apabila memiliki *cronbach alpha* lebih dari 0,60 (Nunnaly, 1994 dalam Ghozali, 2006).

Nilai *cronbach alpha* instrument variabel akuntabilitas keuangan adalah 0.690. Dari angka *cronbach alpha* tersebut dapat dilihat bahwa variabel ini (Akuntabilitas Keuangan)

memiliki nilai *cronbach alpha* diatas 0.60 sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel.

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen dan variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak.

**Tabel 8 Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		76
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	1.15779865
Most Extreme Differences	Absolute	.104
	Positive	.079
	Negative	-.104
Kolmogorov-Smirnov Z		.908
Asymp. Sig. (2-tailed)		.382
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Sumber: Data Diolah

Pada hasil uji statistik terlihat nilai signifikansi dari *unstandardized residual* lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,382 sehingga dapat disimpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini sudah terdistribusi normal.

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen), serta tidak boleh terdapat multikolinearitas diantara variabel penjelas pada model tersebut yang diindikasikan oleh hubungan sempurna atau hubungan yang tinggi diantara beberapa atau keseluruhan variabel penjelas.

**Tabel 9  
 Uji Multikolinieritas**

Coefficients <sup>a</sup>							
Model	Unstandardized		Standardized	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	Coefficients		Coefficients			Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta				

	(Constant)	4.565	1.255	3.637	.001				
Berdasarkan	1	X1	.377	.093	.398	4.064	.000	.470 2.127	
		X2	.385	.078	.483	4.940	.000	.470 2.127	
hasil	a. Dependent Variable: Y							Sumber : Data Diolah	

pengujian yang ditunjukkan uji multikolinearitas, nilai tolerance semua variabel lebih besar dari 10% ( $X1=0.470$ ;  $X2=0.470$ ) dan nilai VIF lebih kecil dari 10 ( $X1=2.127$ ;  $X2=2.127$ ) yang berarti tidak terdapat multikolinearitas antar variabel independen.

Heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

**Tabel 10**  
**Uji Heteroskedastisitas**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.824	.673	1.225	.224
	X1	.038	.050	.129	.451
	X2	-.033	.042	-.136	.427
a. Dependent Variable: Abs_Ut					Sumber : Data Diolah

Pada hasil uji statistik terlihat bahwa seluruh variabel bebas memiliki signifikansi lebih besar dari 0,05 atau sebesar  $X1=0.451$ ;  $X2=0.427$  sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

Untuk menguji hipotesis mengenai pengaruh secara parsial dan simultan menggunakan uji F (Anova) dan uji t. Dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) 0,05 atau 5% atau keyakinan 95% untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima atau ditolak. Pengujian hipotesis dilakukan dengan

menggunakan model analisis regresi berganda bertujuan untuk memprediksi berapa besar kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi linear berganda bertujuan untuk memprediksi berapa besar kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

**Tabel 11**  
**Regresi Linear Berganda**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.819 <sup>a</sup>	.671	.662	1.17355

a. Predictors: (Constant), X2, X1 Sumber : Data Diolah

Dari hasil regresi dapat diketahui angka *Adjusted R-Square* menunjukkan koefisien determinasi atau peranan *variance* (variabel independen dalam hubungan dengan variabel dependen). Angka *Adjusted R-Square* sebesar 0.662 menunjukkan bahwa 66,2% variabel independen dapat dijelaskan oleh variabel dependen, sedangkan sisanya sebesar 33,8% dijelaskan oleh faktor atau variabel lain.

Uji F digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh simultan variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian yang digunakan adalah jika *probability value* (p value) < 0,05, maka  $H_a$  diterima dan jika p value > 0,05, maka  $H_a$  ditolak.

**Tabel 12**  
**Uji F (F-Test)**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	205.502	2	102.751	74.607	.000 <sup>b</sup>
	Residual	100.537	73	1.377		

Total	306.039	75
a. Dependent Variable: Y		
b. Predictors: (Constant), X2, X1		
Sumber : Data Diolah		

Uji Anova atau *F-test* menghasilkan  $F_{hitung}$  sebesar 74.607 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Nilai *F-test* digunakan untuk melihat hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen yaitu sebesar 74.607 dengan signifikansi 0,000. Karena probabilitas signifikan lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau dapat dikatakan variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen, **yang artinya bahwa pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah dan aktivitas pengendalian secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.** Hal ini berarti bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini adalah layak.

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah secara langsung variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan atau tidak .

**Tabel 13**  
**(Uji Signifikansi Parsial)**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error			
	(Constant)	4.565	1.255		3.637	.001
1	X1	.377	.093	.398	4.064	.000
	X2	.385	.078	.483	4.940	.000

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan hasil analisis regresi, diperoleh hasil uji t yaitu variabel pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah (X1) dan aktivitas pengendalian (X2) secara parsial

berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan (Y). Untuk variabel X1 memberikan nilai koefisien parameter sebesar 0.377 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000, sehingga dengan tingkat signifikan dibawah 0,05 dapat disimpulkan bahwa **variabel X1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y**. Untuk variabel X2 memberikan nilai koefisien parameter sebesar 0.385 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000, sehingga dengan tingkat signifikan dibawah 0,05 dapat disimpulkan bahwa **variabel X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y**. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda yang bertujuan untuk memprediksi berapa besar kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. maka dapat dilihat persamaan sebagai berikut:

$$Y = 4,565 + 0,377X1 + 0,385X2$$

Dari persamaan diatas, dapat dilihat bahwa koefisien dari variabel akuntabilitas keuangan menunjukkan angka positif. Berarti bahwa hubungan antara pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Aktivitas Pengendalian dengan Akuntabilitas Keuangan adalah positif yaitu semakin bagus proses pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah dan aktivitas pengendalian maka akuntabilitas keuangan daerah akan semakin baik.

Hasil persamaan regresi berganda dapat dilihat bahwa pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berpengaruh positif dan signifikan. Berdasarkan hasil ini dapat dikatakan bahwa pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) baik dari segi prosedur akuntansi penerimaan, pengeluaran, aset tetap, pencatatan, dan pelaporan akan memperkuat akuntabilitas keuangan daerah sehingga dapat memberikan informasi untuk membantu pemerintah daerah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik, demi kesejahteraan

masyarakat di Kabupaten Gianyar, sehingga tingkat pertumbuhan pembangunan pada Pemerintahan Kabupaten Gianyar akan semakin baik.

Aktivitas pengendalian berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh AS Sifa Nurillah (2014) dengan judul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemahaman sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Interen terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. (Studi Empiris pada SKPD Kota Depok). Sehingga pemerintah daerah sangat perlu melaksanakan penguatan pemahaman mengenai aktivitas pengendalian internal karena dengan aktivitas pengendalian yang baik maka akuntabilitas keuangan daerah dapat menjadi cepat dan tepat serta penyusunan laporan keuangan daerah dapat menjadi lebih akuntabel.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Hasil penelitian ini memberi kesimpulan bahwa faktor pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap akuntabilitas keuangan di Pemerintah Kabupaten Gianyar. Faktor aktivitas pengendalian berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap akuntabilitas keuangan di Pemerintah Kabupaten Gianyar. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan aktivitas pengendalian sebesar 66,2% dapat dijelaskan oleh variabel akuntabilitas keuangan, sedangkan sisanya sebesar 33,8% dijelaskan oleh faktor atau variabel lain.

Saran yang diberikan dari simpulan tersebut yaitu untuk mennghadapi berbagai tuntutan dan kebutuhan di masa mendatang, pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Gianyar harus lebih serius dalam melaksanakan pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan pelaksanaan aktivitas pengendalian, serta pemerintah juga

harus lebih serius dalam penataan Sumber Daya Manusia (SDM) ASN, baik dari segi pola karir, potensi, dan kemampuan ASN.

Mengenai permasalahan dan keluhan OPD terhadap penempatan ASN keuangan yang kurang optimal, maka saran penulis adalah bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam melihat minat, bakat, potensi dan kemampuan masing-masing ASN. BKN mempunyai program yang bernama “*talent pool*”. *Talent pool* merupakan pemetaan hasil penilaian potensi dan kompetensi ASN yang dilaksanakan oleh BKN sehingga dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam menyusun pola pengembangan kompetensi ASN, pengembangan diri (*self development*), dan peta karier yang disesuaikan dengan kebutuhan instansi di Pemerintah Kabupaten Gianyar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ancok, D. 1998. *Teknik Penyusunan Skala Pengukur*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta. Bastian, Indra, 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, edisi kedua, Salemba
- Dita Tria Anandita (2016). “*Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Terhadap Akuntabilitas Keuangan (Survey Pada 12 Dinas Pemerintah Kabupaten Bandung Barat)*”. Bandung
- Empat, Jakarta. Erlina dan Sri Mulyani, 2007. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*,
- USU Press, Medan Ghazali, Imam, 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Jogiyanto, 2004. *Metode Penelitian Bisnis Salah Kaprah dan Pengalaman-pengalaman*, cetakan pertama, BPFY Yogyakarta, Yogyakarta Mardiasmo, 2004,
- Mardiasmo, 2002 *Akuntansi sektor publik*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, andi Offset, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2006. *Statistika untuk Penelitian*, cetakan kesembilan, Alfa Beta, Bandung Umar, Husein, 2003. *Metode Riset Akuntansi Terapan*, cetakan pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta

- Umar, Husein, 2001. Riset Akuntansi: Metode Riset Sebagai Cara Penelitian Ilmiah, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara Jurusan Akuntansi, 2004. *Buku Petunjuk Teknis Penulisan Proposal Penelitian dan Penulisan Skripsi*, Medan
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2004 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan, telah mewajibkan Laporan Keuangan Pemerintah menggunakan basis akrual.*
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2004 *Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Daerah*
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang *Pemerintah Daerah.*
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.*
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah.* Republik Indonesia, Peraturan Pemerinta.
- Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.*
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah* Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 *Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.*